

PERBANASNews

No. 148 Tahun XXXIX Oktober-Desember 2022

**RESESI DI
AMERIKA
BY DESIGN
BANKIR
TANAH AIR
HARUS
NGAPAIN?**

**SIMALAKAMA
RASIO KREDIT
UMKM 30 PERSEN**

**BANK-BANK DI ASEAN
MENUJU INTEGRASI
PAYMENT SYSTEM**

PERBANASNews



PENERBIT

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

REDAKSI

Anika Faisal,
Aviliani

REDAKTUR PELAKSANA

Eka Sri Dana Afriza,
Andry Asmoro,
Enrico Tanuwidjaja

SIRKULASI

Wara Sri Indriani

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN

Cover

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

PerbanasNews menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN
PPG/STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.



A lhamdulillah kita menutup tahun 2022 dengan catatan menggembirakan. Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) berhasil menyelenggarakan *event* internasional “50th ASEAN Banking Council Meeting (ABC Meeting)” dengan baik dan lancar. Bahkan, *event* tahunan bankir-bankir ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Banker Association (ABA) itu berhasil menyepakati beberapa poin penting bagi perkembangan industri perbankan dan keuangan di kawasan ASEAN.

Acara yang berlangsung di Meruorah Komodo Hotel, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama dua hari, 1-2 Desember 2022, itu setidaknya berhasil mengangkat dua agenda utama yang selama ini kita impi-impikan. Pertama, kita berhasil mengangkat kembali cita-cita lama industri perbankan di kawasan ASEAN untuk menjadi satu kesatuan “ASEAN banking globe”.

Kedua, kita berhasil menyatukan kesamaan visi akan pentingnya konektivitas, integrasi, dan keberlangsungan sistem pembayaran di kawasan ASEAN ke depan. Banyaknya perubahan yang terjadi di industri perbankan dan keuangan dengan tujuannya mendukung pertumbuhan harus kita sikapi dengan memanfaatkan inovasi digital.

Dua agenda utama ini berhasil disepakati oleh seluruh peserta “50th ASEAN Banking Council Meeting” yang terdiri atas 170 delegasi yang merupakan perwakilan dari 10 negara anggota ASEAN. Ini kesepakatan yang akan dicatat dengan tinta emas karena akan menjadi pijakan awal untuk mewujudkan konektivitas, integrasi, dan keberlanjutan sistem pembayaran di kawasan ASEAN.

Untuk itu, Perbanas sebagai tuan rumah dan penyelenggara acara tersebut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang mendukung acara dari awal hingga akhir. Pertama, kami ucapkan kepada Gubernur NTT, Bapak Viktor Bungtilu Laiskodat, selaku pemangku utama wilayah NTT yang menjadi tempat diselenggarakannya acara tahunan ABA tersebut.

Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi dari 10 negara anggota ASEAN, seluruh asosiasi yang membawahkan mereka, serta kepada otoritas di sektor keuangan dan perbankan. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur BI Bapak Dr. Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Bapak Mahendra Siregar, Sekjen ASEAN Bapak H.E. Dato Paduka Lim Jock Hoi, Ketua ASEAN Bankers Association Bapak Daw Khin Saw Oo, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Bapak Dian Ediana Rae, dan Anggota Dewan Kehormatan BI Institute Bapak Andrew Sheng, Ph.D.

Tak ketinggalan, kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada para pengurus Perbanas yang telah bekerja keras menyiapkan dan mengawal acara yang luar biasa ini hingga selesai dengan lancar dan sukses. Yakinlah, kerja keras Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu menjadi sumbangsih terbaik untuk industri perbankan dan keuangan, serta perekonomian nasional dan kawasan ASEAN.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Tim Redaksi PERBANASNews yang telah membuat laporan *event* “51th ASEAN Banking Council Meeting” pada edisi 148 ini, bertepatan dengan pergantian nama PROBANK menjadi PERBANASNews dengan format baru. Semoga semakin banyak memberi manfaat kepada industri perbankan nasional.

Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Kartika Wirjoatmodjo
Ketua Umum Perbanas



PERBANAS UTAMA

Komitmen Bankir ASEAN Menuju Integrasi Payment System | 3

Konektivitas, integrasi, dan keberlanjutan sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN tinggal menunggu waktu. Inisiatif telah digaungkan bersama pada ABC Meeting Ke-50 di Labuan Bajo, akhir tahun lalu. Harapan baru untuk meningkatkan skala dan kapasitas ekonomi ASEAN.

PERBANAS UTAMA

Deal Tiga Komite & ABC Meeting Ke-51 di Laos | 6

Tiga komite menyepakati banyak hal pada ABC Meeting Ke-50 di Labuan Bajo, NTT. Termasuk, rencana penyelenggaraan ABC Meeting Ke-51 di Laos.



LAPORAN KHUSUS

Membedah Pasal-Pasal Penting di UU P2SK | 8

UU P2SK telah resmi diberlakukan. Ada XXVII bab dan 341 pasal menyangkut sektor keuangan. Pasal-pasal mana saja yang menjadi "jantung" bagi industri perbankan nasional?



LAPORAN KHUSUS

Simalakama Rasio Kredit UMKM 30 Persen | 10

INTERVIEW

*Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc.,
Ketua Badan Pengawas Perbanas*

Resesi di AS By Design, Bankir Harus Lakukan Tiga Hal Ini | 14

Tahun 2023 masih akan menyisakan tantangan berat bagi perekonomian Indonesia. Geopolitik dan kondisi ekonomi di Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok menjadi faktor penentu. Apa yang mesti dilakukan praktisi perbankan nasional?



GREEN BANKING

Momentum Green Banking Saat Harga Batu Bara Melandai | 18

Penerapan *green banking* di Indonesia adalah satu keniscayaan di tengah tren global yang mengarah ke ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum optimal. Sampai kapan?

STATISTIK

Banyak Jalan Menuju Modal Inti Tiga Triliun | 20

Meski terseok-seok, hampir semua bank bisa memenuhi persyaratan modal inti sebesar Rp3 triliun. Hanya satu bank yang terkena penalti dan harus berganti baju menjadi BPR.

REGULATOR

Siapa Paling Kompeten Menjadi Pengawas Koperasi | 21

Koperasi simpan pinjam membutuhkan pengawas dalam operasionalnya. Namun, belum ada titik temu. Siapa yang paling kompeten?

ACTIVITY

Peringati 17 Tahun Berbakti, IBI Gelar Turnamen Golf | 22

Tali Kasih Perbanas di Blitar dan Trenggalek | 24

SUPLEMEN

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

- PT Seven Bulls Investama | 13
- PT Bank IBK Indonesia | 13
- PT Jotun Indonesia | 19
- PT Bank Syariah Indonesia | 19

Komitmen Bankir ASEAN Menuju Integrasi Payment System



Konektivitas, integrasi, dan keberlanjutan sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN tinggal menunggu waktu. Inisiatif telah digaungkan bersama pada ABC Meeting Ke-50 di Labuan Bajo, akhir tahun lalu. Harapan baru untuk meningkatkan skala dan kapasitas ekonomi ASEAN.



ABUAN Bajo, 2 Desember 2022, menjadi saksi sejarah lahirnya inisiatif untuk mempersatukan sistem pembayaran di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Bertempat di Meruorah Komodo Hotel, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), lebih dari 170 bankir dan profesional yang menjadi delegasi dari 10 negara ASEAN menyatakan sikap akan pentingnya konektivitas, integrasi, dan keberlanjutan sistem pembayaran di kawasan ASEAN.

Pernyataan sikap yang disuarakan dalam forum internasional "50th ASEAN Banking Council Meeting (ABC Meeting)" di Labuan Bajo tersebut menjadi *urgent* di tengah transformasi digital di sektor perbankan dan sistem pembayaran yang begitu masif. Nyaris tak ada batas lagi (*borderless*) antarnegara di kawasan ASEAN, bahkan dunia, dalam hal transaksi keuangan. Karena itu, kesepakatan dan komitmen untuk mempersatukan sistem pembayaran antarnegara ASEAN yang diinisiasi bankir-bankir di kawasan ini, menjadi pintu masuk untuk merealisasikan ide tersebut.

Kesepakatan dan komitmen yang terlahir di forum ABC Meeting ke-50 yang difasilitasi oleh Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) itu memiliki kekuatan

POTENSI EKONOMI 10 NEGARA ASEAN

No	Negara	Potensi Ekonomi
1.	Singapura	Perdagangan, elektronik, penyulingan minyak, petrokimia.
2.	Brunei Darussalam	Pertambangan (minyak bumi, gas alam).
3.	Malaysia	Pertanian (padi, teh, tebu, kakao, kelapa sawit, karet, buah-buahan), industri (tekstil, bahan kimia, elektronik), pertambangan (minyak, gas alam, bijih besi, timah, bauksit, tembaga, emas), kehutanan.
4.	Thailand	Pertanian (padi), perkebunan, kehutanan (kayu jati), industri (tekstil, semen, elektronik), pertambangan (timah, mangan), pariwisata.
5.	Indonesia	Pertanian (padi, jagung, tebu, teh, kelapa sawit, kopi, tembakau, cengkeh, karet, buah-buahan, sayur-sayuran), pertambangan (minyak bumi, emas, batu bara, nikel, perak, besi, belerang, mangan, timah, aluminium), pariwisata.
6.	Filipina	Pertanian (nanas, padi, kelapa, gula), pertambangan (tembaga, emas, nikel bijih besi, minyak bumi), industri.
7.	Vietnam	Pariwisata, jasa (perhotelan, restoran, transportasi).
8.	Laos	Pertanian (padi, jagung), peternakan, kehutanan, pertambangan (batu bara, timah, tembaga).
9.	Kamboja	Pertanian (padi), pertambangan (tembaga, besi, mangan, emas), perikanan, kehutanan (mahoni, jati).
10.	Myanmar	Pertanian (padi), perkebunan (tebu), kehutanan (jati), pertambangan (seng, tembaga, emas, perak, timah, minyak bumi).

Sumber: Biro Riset Infobank (birl).

signifikan untuk diwujudkan dalam bentuk aksi nyata kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Sebab, forum tersebut dihadiri para pemangku kepentingan di sektor keuangan dan perbankan di seluruh ASEAN.

Mereka yang hadir antara lain Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo (hadir secara *daring*); Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar (*daring*); Ketua Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo; Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat; Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN, H.E. Dato Paduka Lim Jock Hoi; Ketua ASEAN Bankers Association (ABA), Daw Khin Saw Oo; Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae; Anggota Dewan Kehormatan BI Institute, Andrew Sheng; Ketua Komite Pengarah ABC Meeting, Taswin Zakaria; dan Sekjen Perbanas, Anika Faisal.

Pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu menyepakati pentingnya konektivitas, integrasi, dan keberlanjutan pembayaran sistem yang akan meningkatkan skala dan kapasitas ekonomi ASEAN. Tak sekadar kesepakatan di atas kertas, masing-masing perwakilan dari negara-negara ASEAN tersebut akan langsung meninjau dan menyiapkan peraturan yang memungkinkan konektivitas dan integrasi sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN bisa segera direalisasikan.

"Kami menanggapi inisiatif ini secara positif agar terjadi integrasi dan koneksi antara negara-negara ASEAN yang meringankan biaya transaksi perbankan, serta diharapkan mampu meningkatkan volume dan transaksi sistem pembayaran di daerah," ujar Perry Warjiyo, saat memberikan kata sambutan pembuka pada forum ABC Meeting Ke-50 itu.

Dukungan dan apresiasi dari Gubernur BI ini sangat penting karena sistem pembayaran berada di bawah otoritas BI sebagai regulator di Indonesia. Lampu hijau dari BI ini tentu diharapkan makin memperlancar proses menuju penyatuan sistem pembayaran yang dicita-citakan bankir-bankir di kawasan ASEAN.

Sementara itu, H.E. Dato Paduka Lim Jock Hoi mengusulkan agar bank-bank di kawasan ASEAN bisa melakukan pembayaran digital secara lintas batas serta menjadi prioritas dan dukungan utama terhadap *e-commerce* di ASEAN dalam pembentukan ekonomi digital di kawasan ini. Ia juga mendorong ABA untuk bekerja sama dengan masing-masing pemerintah anggota ASEAN terkait dengan

pembayaran lintas batas dan terlibat dalam dialog untuk mengembangkan kerangka kerja yang relevan.

Daw Khin Saw Oo juga menyampaikan hal senada. Ia sangat mengapresiasi forum Pertemuan Dewan Perbankan ASEAN Ke-50 tersebut. "Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memperkuat kerja sama antaranggota ABA dalam konektivitas dan keberlanjutan melalui inovasi digital," ujar Saw Oo, saat memberikan kata sambutan.

Tak hanya BI, OJK sebagai otoritas di

sektor perbankan dan keuangan di Indonesia pun sangat mendukung dan mengapresiasi inisiatif yang digulirkan ABA. OJK sangat mendukung sistem keuangan yang berkelanjutan, sistem keuangan digital, dan integrasi keuangan di kawasan ASEAN. "Tanpa batas interkoneksi sistem pembayaran di kawasan ASEAN berpotensi mendukung perekonomian pembangunan. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara ASEAN," ujar Mahendra Siregar, saat memberikan kata sambutan.

Menurut Mahendra, perlu dibentuk kelompok kerja yang membahas bagaimana visi besar tersebut dapat diwujudkan bersama. Untuk itu, setiap negara perlu mempelajari dan menyiapkan regulasi yang memungkinkan konektivitas sistem pembayaran tanpa batas di kawasan ASEAN.

Dian Ediana Rae menambahkan, regulator akan fokus pada kebijakan yang meningkatkan ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, seperti pengembangan regulasi tentang kredit karbon untuk kendaraan listrik dan tenaga energi terbarukan tanaman. "Harmonisasi regulasi antar-regulator di negara-negara ASEAN



“Tanpa batas interkoneksi sistem pembayaran di kawasan ASEAN berpotensi mendukung perekonomian pembangunan, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh negara ASEAN,” ujar Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) maupun BI Fast, telah sukses dan dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, skala dan kapasitas ini bisa meningkat di tingkat ASEAN,” ujar Kartika.

Selaku Ketua Dewan Pengarah 50th ABC Meeting, Taswin Zakaria dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada perwakilan dari masing-masing negara dan asosiasi yang secara aktif berpartisipasi dalam mengusulkan dan merumuskan strategi serta kerangka kerja untuk mewujudkan berbagai komitmen yang telah disepakati bersama. “Mudah-mudahan ASEAN Banking Council Meeting Ke-50 ini dapat mempercepat interkoneksi melalui inovasi digital,” ujarnya.

Sementara itu, Andrew Sheng dalam presentasinya menyoroti beberapa poin penting terkait dengan krisis geopolitik, seperti kurang harmonisnya hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang bisa mendatangkan tantangan besar bagi industri perbankan di kawasan ASEAN. Untuk itu, bankir ASEAN harus berinvestasi dalam sistem pembayaran yang akan meminimalkan potensi risiko sanksi atau gangguan dalam tantangan hegemoni tersebut. “Dengan ASEAN yang semakin tangguh dan dengan populasi yang relatif besar dan muda, mengejar strategi pertumbuhan secara lebih luas dengan merangkul keseimbangan pasar domestik dan lebih kuat, keseimbangan eksternal akan membawa optimisme dari wilayah ini untuk menavigasi ketidakpastian yang lebih tinggi di masa depan,” tutur Andrew Sheng. ■

merupakan kunci untuk mewujudkan visi kami dan meningkatkan implementasi keuangan hijau. OJK aktif berkoordinasi dan bernegosiasi dengan negara-negara lain yang akan diuntungkan untuk transisi menuju *green economy*,” ujarnya.

Kartika Wirjoatmodjo pun menyambut baik berbagai komitmen yang disepakati dalam ABC Meeting Ke-50 tersebut untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di kawasan ASEAN. Namun, pelaksanaan kesepakatan ini harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara karena tantangannya bervariasi.

“Perbanas akan menginisiasi *working group* untuk mewujudkan sistem pembayaran yang inklusif di wilayah ASEAN. Kami melihat bahwa terobosan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menghadirkan program yang efektif dan sistem pembayaran yang efisien, baik melalui

Deal Tiga Komite & ABC Meeting Ke-51 di Laos

Tiga komite menyepakati banyak hal pada ABC Meeting Ke-50 di Labuan Bajo, NTT. Termasuk, rencana penyelenggaraan ABC Meeting Ke-51 di Laos.

Selain kesepakatan dan komitmen untuk mengintegrasikan sistem pembayaran antarnegara di kawasan ASEAN, ABC Meeting Ke-50

menyetujui proposal dari tiga komite tetapnya, yaitu Komite Kerja Sama Keuangan, Investasi, Perdagangan, dan Teknologi (Committee on Cooperation in Finance, Investment, Trade and Technology/COFIT); Komite Hubungan Antar Kawasan ASEAN (Committee on ASEAN Inter-Regional Relations/IRR); dan Komite Edukasi Perbankan.

Pertama, Komite Kerja Sama Keuangan, Investasi, Perdagangan, dan Teknologi sepakat bahwa, mengingat pentingnya pembayaran *interoperable* di ASEAN, ABA mendukung penerbitan panduan praktik terbaik untuk menghubungkan sistem pembayaran antarnegara. Panduan ini telah dikembangkan agar dapat diadaptasi untuk keadaan yang berbeda sepanjang waktu dalam konteks bisnis atau teknis yang

berbeda dan akan berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut solusi pembayaran lintas batas di wilayah tersebut.

Komite ini juga membahas pengembangan *interoperable data framework* untuk ASEAN, yang akan sangat penting untuk hubungan digital lintas batas, seperti perdagangan digital dan pembayaran.

Tentang digitalisasi perdagangan dan keuangan berkelanjutan, para anggota komite saling berbagi kemajuan yang dicapai di negara masing-masing. Mereka sepakat untuk melanjutkan kerja sama yang erat untuk kemajuan lebih lanjut dari topik-topik ini, yang akan sangat penting untuk masa depan jangka panjang kawasan ini.

Kedua, Komite Hubungan Antar Kawasan ASEAN melaporkan bahwa sesi *study tour virtual* Indonesia 2022 sukses digelar di Sekretariat ASEAN pada 11 Oktober 2022. Hal tersebut memberikan wawasan yang sangat baik tentang berbagai inisiatif, upaya pemulihan pasca-COVID-19 di bawah Sekretariat ASEAN. Juga, perkembangan dan inovasi terkini yang diperkenalkan dan diimplementasikan di bawah visi komunitas ASEAN 2025 dan konektivitas ASEAN 2025 untuk mempromosikan inklusi keuangan, integrasi keuangan, dan stabilitas keuangan.

Untuk 2023, disarankan *study tour* dilakukan secara *virtual* atau *hybrid* untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dan mengakomodasi agenda perbankan nasional anggota asosiasi. Usulan ini disepakati oleh jajaran pengurus.

Sebagaimana diputuskan komite, area fokus dipersempit menjadi topik yang berkaitan dengan bank sentral mata uang digital (CBDC), inklusi keuangan, dan konektivitas ASEAN *masterplan* pada ASEAN Konektivitas 2025. Tempat yang diusulkan untuk topik ini akan dipilih berdasarkan pembicara yang teridentifikasi untuk topik ini.

Ketiga, Komite Edukasi Perbankan melaporkan telah resmi meluncurkan portal pelatihan ABA untuk diakses oleh semua bank anggota dan personel perbankan nasional yang berbeda asosiasi dengan ABA. Portal ini berupa buletin dan pendaftaran



PENDAPATAN PER KAPITA (PDB) 10 NEGARA ASEAN



No.	Negara	PDB
1.	Singapura	\$65.233 (Rp935,37 Juta)
2.	Brunei Darussalam	\$31.086 (Rp445,72 Juta)
3.	Malaysia	\$11.414 (Rp163,66 Juta)
4.	Thailand	\$7.806 (Rp111,93 Juta)
5.	Indonesia	\$4.135 (Rp59,29 Juta)
6.	Filipina	\$3.485 (Rp49,93 Juta)
7.	Vietnam	\$2.715 (Rp38,93 Juta)
8.	Laos	\$2.534 (Rp36,33 Juta)
9.	Kamboja	\$1.643 (Rp23,55 Juta)
10.	Myanmar	\$1.407 (Rp20,18 Juta)

Sumber: Worldatlas.com, 16 April 2021.

khusus untuk anggota secara *online*, mendapat fasilitas program pelatihan yang ditawarkan penyedia pelatihan yang berbeda dari Asosiasi Bank Nasional (National Bank Associations/NBA) lainnya di kawasan serta penyedia pelatihan internasional.

Asosiasi Bankir Filipina (The Bankers Associations of The Philippines/BAP) yang bertindak sebagai administrator portal, akan memulai beberapa proses. Pertama, pendaftaran pengguna yang ditunjuk per bank melalui perwakilan masing-masing manajer sumber daya manusia (SDM) dan berkoordinasi dengan masing-masing asosiasi bank nasional yang berbeda. Kedua, penandatanganan nota kesepahaman (*memorandum of understanding/ MoU*) antara ABA dan penyedia pelatihan berbeda yang akan mengajukan penawaran pelatihan mereka ke portal dengan draf *MoU* diserahkan ke Sekretariat ABA untuk ditinjau lebih lanjut. Ketiga, promosi portal pelatihan ABA, cara penggunaan dan fitur-fiturnya, ke berbagai asosiasi perbankan nasional melalui berbagi video dan bahan promosi lainnya.

Komite telah melanjutkan proses adopsi *e-learning* kursus Asia Sustainable Finance Initiative (ASFI) 1 untuk kepentingan semua pejabat dan personel anggota asosiasi perbankan nasional yang berbeda di luar ABA. Dewan juga menyetujui pengaturan kolaboratif baru dengan Perbanas sebagai *co-chair* di COFIT. Sementara, The Thai Bankers Association (TTBA) menjadi *co-chair* di ASEAN-IRR.

Komite juga sepakat untuk menggelar ABC Meeting Ke-51 dan Konferensi Perbankan ASEAN Ke-23 pada November 2023 di Vientiane, Laos, dan diselenggarakan oleh Laos Bankers Association (LBA). ■

BERKAT INOVASI DIGITAL SURVIVE HADAPI PANDEMI



NTEGRASI sistem pembayaran di kawasan ASEAN tak bisa dilepaskan dari pemanfaatan inovasi digital di sektor keuangan dan perbankan. Terbukti, inovasi digital mampu membawa perbankan keluar dari tantangan berat pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dengan ketahanan sistem keuangan di Indonesia, khususnya perbankan, yang cukup kuat di masa pandemi Covid-19, yang bahkan memicu kemunculan bank digital di Tanah Air.

Semasa pandemi, perbankan di Indonesia melakukan sejumlah inovasi sebagai langkah adaptasi menghadapi tekanan dengan adanya kebijakan *lockdown* dan *social distancing*. Aktivitas ini membawa keuntungan tersendiri bagi industri perbankan. Dalam catatan Perbanas,

tingkat profitabilitas perbankan Indonesia relatif tinggi di masa pandemi. Hal ini tecermin dari peningkatan margin laba bersih dua digit mencapai hampir 47 persen (yoy) dengan nilai Rp134,8 triliun per 22 Agustus.

"Margin bunga (*net interest margin/NIM*) di bank-bank besar di Indonesia lebih dari 5 persen, melebihi rata-rata industri yang sebesar 4,7 persen. Pertumbuhan NIM didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dan dana murah," ujar Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo saat memberikan sambutan di acara "50th ASEAN Banking Council Meeting" di Labuan Bajo, NTT.

Meningkatnya profitabilitas perbankan Indonesia di antaranya ditopang oleh inovasi yang muncul dari bank konvensional melalui solusi digitalnya. Beberapa contoh inovasi digital yang muncul di masa pandemi antara lain Super Apps Livin by Mandiri. Produk inovasi digital Bank Mandiri ini merupakan salah satu hasil nyata dari transformasi digital di sektor perbankan, yang menyediakan semua layanan keuangan lengkap dan ekosistem digital dalam genggaman. Per September 2022, nilai transaksinya mencapai Rp1.716 triliun.

Selain itu, berkat dukungan OJK dan BI, di masa pandemi telah bermunculan sejumlah bank *digital native* baru, yang merupakan transformasi dari bank kecil dan konvensional. "Diperjuangkan oleh Bank Artos, bank umum konvensional bertransformasi menjadi bank *full digital* bernama Bank Jago. Bank digital dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan keuangan di era teknologi saat ini. Dengan proses e-KYC (*know your customer*) yang *full digital*, pengguna juga dapat melakukan *budgeting* melalui fitur *Pocket* yang dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan," jelas Tiko, sapaan Kartika Wirjoatmodjo.

Tak sekadar *survive* menghadapi pandemi, dalam kurun waktu dua tahun beroperasi, Bank Jago mampu membukukan laba sebesar Rp41 miliar. Keberhasilan tersebut didukung oleh peningkatan pinjaman yang disalurkan dan peningkatan dana pihak ketiga. Hal ini tidak lepas dari kerjasama dengan ekosistem digital yang telah mendatangkan sekitar 4,2 juta pelanggan baru, meningkat tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. ■

Membedah Pasal-Pasal Penting di UU P2SK

UU P2SK telah resmi diberlakukan. Ada XXVII bab dan 341 pasal menyangkut sektor keuangan. Pasal-pasal mana saja yang menjadi “jantung” bagi industri perbankan nasional?

Kamis, 15 Desember 2022, menjadi awal diberlakukannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), setelah Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkannya. Ada beberapa substansi penting dalam UU P2SK yang telah disepakati. Setidaknya, ada enam poin.

Satu, penguatan dan keberlanjutan kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan jaring pengaman sistem keuangan. Dua, pengembangan dan penguatan industri sektor keuangan yang disertai dengan perluasan mandat dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tiga, penguatan tata kelola lembaga keuangan dalam pelaporan, inovasi teknologi, literasi keuangan, dan penegakan hukum sektor keuangan. Empat, pengaturan mengenai konglomerasi keuangan, akses pembiayaan, dan inklusi keuangan. Lima, penguatan kegiatan usaha koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan syariah.

Enam, tak hanya akan memperluas mandat kelembagaan pengelola kebijakan moneter dan keuangan untuk mencapai stabilitas makro, UU P2SK juga berfungsi sebagai intermediasi sektor keuangan. Pengaturan UU P2SK dimaksudkan supaya terjadi sinergi yang lebih optimal dari lembaga-lembaga tersebut dalam mengelola penanganan dan pengembangan sektor keuangan di Indonesia.

Dengan enam substansi penting kesepakatan tersebut, ada banyak perubahan dari UU sebelumnya. Dan, ini menjadi langkah awal *Omnibus Law* sektor keuangan Indonesia. Seluruh UU sektor keuangan dijadikan satu. UU P2SK ini benar-benar menjadi UU “sapu jagat”.

Misalnya, terkait dengan independensi BI. Meski tetap independen, BI tak lagi terbatas waktu dalam *burden sharing*, yang sejatinya selesai akhir 2022 lalu. Selain itu, LPS akan menerima tugas baru, yaitu menjamin polis asuransi. Sementara, OJK akan mengawasi *crypto-currency*. OJK juga akan mengawasi koperasi, khususnya koperasi yang terbuka menerima dana masyarakat. Meski jumlah komisioner akan ditambah, beban berat pengawasan akan membayang-bayangi OJK ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa keberadaan UU P2SK ini dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat. Bahkan, dia menilai, target Indonesia Maju pada 2045 bisa terealisasi dengan UU ini. “Menjadi tonggak penting bagi reformasi sektor keuangan dan merupakan salah satu fondasi penting untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045,” kata Sri Mulyani dalam pembahasan RUU P2SK dengan Panitia Kerja (Panja) DPR, Kamis (15/12).

Jika dibedah isinya, UU P2SK mengatur lima hal yang sangat krusial bagi reformasi sektor keuangan, yaitu penguatan kelembagaan otoritas



sektor keuangan dengan tetap memperhatikan independensi, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk kesejahteraan dan dukungan pembiayaan pembangunan yang berkesinambungan, perlindungan konsumen, serta literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

UU P2SK diawali dengan bab 1 mengenai ketentuan umum pasal 1; bab 2 tentang asas maksud, tujuan, serta ruang lingkup yang terdiri atas pasal 2 dan pasal 3; bab 3 mengenai kelembagaan yang terdiri atas pasal 5 tentang bagian umum, pasal 6 KSSK, pasal 7 LPS, pasal 8 OJK, pasal 9 BI, pasal 10 rupiah digital, hingga pasal 11 tentang pengembangan sektor keuangan.

Sementara, pasal 12 membahas tentang pengendalian tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme, bab 13 tentang bagian umum perbankan, pasal 14 perbankan, dan pasal 15 tentang perbankan syariah.

Pasal 16 masuk ke dalam bab 5 terkait dengan pasar modal, pasar uang, dan pasar valas tentang infrastruktur pasar, pasal 17 tentang penyelenggaraan infrastruktur pasar, pasal 18 instrumen keuangan dalam transaksi pasar modal, pasal 19 sampai dengan pasal 22 tentang pasar modal.

Selanjutnya, pasal 23 sampai dengan pasal 26 membahas tentang bursa karbon, pasal 27-32 mengenai pasar uang dan pasar valas, pasal 33 sarana kliring di pasar keuangan, pasal 34

pengembangan pasar keuangan, dan pasal 35 tentang fungsi pengelolaan dana perwalian.

Lalu, pasal 36 tentang permohonan pailit badan pengelola instrumen keuangan, pasal 37 pengelolaan instrumen keuangan dan pengelolaan dana perwalian, pasal 38 mengenai OJK yang berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran, dan pasal 39 mengenai pengaturan lebih lanjut tentang pengembangan pasar keuangan oleh pemerintah.

Berikutnya, pasal 40-47 membahas tentang penyelesaian transaksi, pasal 48 kegiatan usaha penukaran valas, pasal 49 dan 50 tentang kegiatan usaha penukaran valas. Pasal 51-52 mengenai perasuransian, pasal 53-54 asuransi usaha bersama, pasal 55 anggaran dasar usaha bersama, pasal 56 keanggotaan usaha bersama, pasal 57 organ usaha bersama, pasal 58 wewenang RUA, pasal 59 penyelenggaraan RUA, dan pasal 60 tentang RUA tahunan dan RUA luar biasa.

Sementara, pasal 61 membahas mengenai kepesertaan RUA; pasal 62 dan 63 pemilihan peserta RUA; pasal 64 pemilihan RUA; pasal 65 masa tugas dan pemberhentian peserta RUA; pasal 66 RUA; pasal 67-68 pengurusan usaha bersama; pasal 69 masa tugas dan pemberhentian direksi usaha bersama; pasal 70 tugas, wewenang, dan kewajiban direksi usaha bersama; pasal 71 kewajiban anggota direksi usaha bersama; pasal 72 pengawasan usaha bersama hingga pasal 73; pasal 74 masa tugas dan pemberhentian dewan komisaris usaha bersama; serta pasal 75-76 tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab komisaris usaha bersama.

Lalu, pasal 77 membahas tentang perubahan bentuk badan hukum, pasal 78 pembubaran usaha bersama, pasal 79 penyelenggaraan program penjamin polis, pasal 80-85 kepesertaan penjamin polis, dan pasal 86-89 tentang penyelenggara program penjamin polis.

Pasal 90 mengenai mekanisme penanganan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah bermasalah, pasal 92 tentang likuidasi hingga pasal 101, pasal 102 pengelolaan aset dan kewajiban hingga pasal 103, dan pasal 104-105 tentang penjaminan.

Selanjutnya, pasal 106-107 membahas tentang usaha jasa pembiayaan dan ruang lingkupnya, pasal 108 bentuk badan hukum, pasal 109 kepemilikan, pasal 110-111 kepengurusan dan penilaian kemampuan dan kepatuhan, pasal 112 sumber dana penyertaan, pasal 113-114 izin usaha, pasal 115 konversi dan pembentukan unit usaha syariah (UUS), pasal 116-123 penyelenggaraan usaha, dan pasal 124 tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan, serta pemisahan.

Pasal 125 mengenai pencabutan izin usaha, pasal 126 asosiasi penyelenggara usaha jasa pembiayaan, pasal 127 profesi penunjang usaha jasa pembiayaan, pasal 128-129 pengawasan dan pelaporan, pasal 130-132 kegiatan usaha *bullion*, dan pasal 133-200 tentang dana pensiun, program jaminan hari tua, dan program dana pensiun.

Pasal 201 mengenai koperasi di sektor jasa keuangan, pasal 203-204 lembaga keuangan mikro, pasal 205-212 konglomerasi keuangan, pasal 213 inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) sampai dengan pasal 224, pasal 225-229 tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan, pasal 230-248

tentang cakupan perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Pasal 249-251 terkait dengan akses pembiayaan mikro, kecil, dan menengah; pasal 252-273 tentang sumber daya manusia (SDM); pasal 274-276 stabilitas sistem keuangan; pasal 277-278 LPEI; pasal 279-282 mengenai sanksi administrasi terkait dengan ITSK; pasal 283 tentang sanksi administrasi terkait dengan usaha jasa pembiayaan; dan pasal 25 tentang sanksi administrasi terkait perlindungan konsumen.

Pasal 287-290 tentang ketentuan pidana terkait penjaminan polis; pasal 291 hingga 295 ketentuan pidana terkait dengan usaha jasa pembiayaan; pasal 296-298 tentang ketentuan pidana; pasal 299-300 tentang ketentuan pidana terkait dengan pasar uang dan pasar valas; dan pasal 301-306 terkait dengan kegiatan usaha *bullion*. Ketentuan lain-lain dibahas dalam pasal 307, ketentuan peralihan dari pasal 308 hingga 325, dan ketentuan penutup tertera dalam pasal 326-341.

"Bagian akhirnya berbunyi agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaga negara Republik Indonesia," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, selaku pimpinan Panja.

Dari UU tersebut, terlihat bahwa cara KSSK dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan berubah. Tugas KSSK akan makin ketat. Bukan hanya menangani krisis sistem keuangan, tapi juga akan menangani permasalahan lembaga jasa keuangan yang sistemik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan yang normal maupun dalam kondisi krisis.

Di dalam UU P2SK pasal 5 dijelaskan bahwa KSSK bertugas melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, melakukan penanganan krisis sistem keuangan. KSSK juga bertugas melakukan koordinasi penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Tak hanya itu, wewenang KSSK pun berubah dari UU *existing*, UU Nomor 9 Tahun 2016, dari 11 kewenangan menjadi 9 kewenangan. Pemerintah dan DPR juga menyepakati untuk tidak menghapus pasal 47 dari UU Bank Indonesia (BI). Pasal ini adalah substansi mengenai pelarangan Anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Mengingat draf UU P2SK usulan DPR sebelumnya, diusulkan agar pasal 47 tersebut dihapus. Namun, kini pemerintah dan DPR sepakat untuk tetap menghadirkan pasal tersebut. Artinya, Anggota Dewan Gubernur BI tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik.

Di dalam UU P2SK, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk tak lagi menggunakan istilah "bank gagal". Selain itu, pemerintah dan DPR sepakat untuk tidak lagi menggunakan *term* atau kalimat "bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai wewenang yang dimilikinya". *Term* atau istilah tersebut diganti menjadi "bank dalam resolusi". ■

Simalakama Rasio Kredit UMKM 30 Persen

Aturan BI terkait rasio kredit UMKM perbankan mematok target prestisius: 25% di tahun 2023 dan 30% di tahun 2024. Tentu, ini regulasi yang menarik, bagi pelaku UMKM. Tapi, bagaimana dari sudut pandang perbankan?

A adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kali pertama melontarkan ide menaikkan rasio kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 30% pada tahun 2024. Menurut Jokowi, saat ini rasio kredit UMKM sudah mencapai 20%. Angka yang menurut dia masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah UMKM yang begitu banyak di Indonesia.

“Oleh karena itu, saya meminta hingga 2024, porsi itu sudah bisa mencapai 30%. Kita tidak bisa mengandalkan pertumbuhan alamiah. Ini harus dijalankan dengan terobosan dari sekarang dan serius,” ujar Jokowi. Pemerintah lantas membandingkan kredit UMKM di negara tetangga seperti Singapura yang sudah mencapai 39% dan Malaysia yang bahkan sudah mencapai 51%.

Para pelaku UMKM tentu bersorak kegirangan mendengar kabar ini. Artinya, akan semakin banyak tawaran pembiayaan, khususnya dari bank, yang akan menghampiri lapak-lapak mereka. Apalagi, selama ini, terlebih semasa pandemi COVID-19, sektor UMKM paling banyak mendapat kucuran kredit. Yang paling fenomenal tentu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan margin bunga hanya 0,5% per bulan.

Tak berlebihan jika rasio kredit UMKM telah menyentuh angka 20%, seperti yang diungkap Jokowi. Selama ini, pemerintah telah menggenjot kredit UMKM dengan berbagai program prioritas, seperti menaikkan platform KUR. Pada tahun 2022, platform KUR ditargetkan sebesar Rp371,17 triliun. Adapun platform KUR tanpa agunan ditingkatkan menjadi Rp100 juta dari Rp50 juta. Kemudian, platform pembiayaan UMKM menjadi Rp20 miliar. Kenaikan platform juga diikuti dengan insentif berupa subsidi bunga 3%.

Regulator di sektor keuangan dan perbankan, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), pun menyambut baik arahan Jokowi. OJK membuat kebijakan prioritas yang memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya UMKM, demi mencapai target kredit UMKM 30% di tahun 2024.

Kebijakan yang dimaksud di antaranya melalui model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh *off-taker*, pembinaan, program-program KUR Klaster, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro, serta skema pemasaran melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Sementara itu, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021. Dengan berlakunya PBI ini, maka PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam

BANK DENGAN RASIO KREDIT UMKM DI ATAS 20 PERSEN

BANK	KREDIT UMKM (%)	NPL (%)
1. BRI	55,06	2,87
2. BNI	21,24	5,00
3. BSI	22,93	5,05
4. Bank Panin	20,80	6,56
5. Bank Maybank Indonesia	20,78	9,16
6. Bank Jatim	24,96	9,62
7. Bank Jateng	26,30	8,70
8. Bank Jago	35,15	0,00
9. BTPN Syariah	99,97	2,38
10. Bank ANZ Indonesia	20,57	5,88
11. Bank Mandiri Taspen	81,05	0,72
12. Bank BPD Bali	43,98	3,29
13. Bank Nagari	94,14	2,62
14. Bank Sumut	31,70	8,84
15. Bank Muamalat	20,20	5,17
16. Bank CCBI	20,22	6,78
17. Bank KB Bukopin	54,43	7,32
18. Bank Mestika	25,28	1,54
19. Bank BPD DIY	23,88	3,91
20. Bank CTBC Indonesia	25,17	2,26
21. Bank MAS	24,56	4,78
22. Bank Sahabat Sampoerna	45,86	3,73
23. Bank Raya	28,05	6,87
24. Bank Commonwealth	43,47	8,14
25. Bank Bengkulu	22,47	2,93
26. Bank Seabank Indonesia	36,12	2,90
27. Bank Jasa Jakarta	28,08	2,78
28. Bank OKE Indonesia	33,78	4,82
29. Bank BJB Syariah	21,12	11,82
30. Bank Amar Indonesia	37,18	6,18
31. Bank Bumi Arta	39,77	5,63
32. Prima Bank	51,95	11,19
33. Bank Fama International	79,21	5,41
34. Bank Neo Commerce	30,02	5,07
35. Bank KB Bukopin Syariah	25,71	11,97
36. Bank Victoria Syariah	25,29	20,25

Sumber: Biro Riset Infobank (per September 2021)

10 BANK DENGAN TOTAL KREDIT UMKM TERBESAR

Bank	Total Kredit (Rp Juta)
BRI	512.658.291
BNI	121.003.413
Bank Mandiri	100.142.123
BCA	81.942.894
BSI	37.333.814
Bank KB Bukopin	29.382.944
Bank Mandiri Taspen	24.830.264
Bank Panin	22.765.130
Bank CIMB Niaga	19.912.473
Bank Nagari	19.555.138

Sumber: Biro Riset Infobank (per September 2021)

rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BI mendukung arahan Jokowi karena dalam catatannya, kredit UMKM memang mengalami peningkatan signifikan. Pada Februari 2022, misalnya, kredit UMKM naik 14,4% secara *year on year (yoy)*. Secara industri, kredit UMKM juga mengalami kenaikan, yakni sebesar 5,9%, mencapai Rp5.741,5 triliun.

Terlebih, jumlah UMKM di Indonesia juga sangat besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64 juta. Angka tersebut setara dengan 99,9% dari total usaha yang beroperasi di Indonesia. Tak heran, sektor UMKM memberikan kontribusi hingga 60,51% atau senilai Rp9.580 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Meski UMKM layak mendapat kucuran kredit, sejatinya perlu dipertimbangkan semangat berlebihan dalam mengejar target seperti yang diatur dalam Peraturan BI: 20% pada tahun 2022, 25% pada tahun 2023, dan 30% pada tahun 2024. Sebab, berdasarkan catatan *PerbanasNews*, masih banyak bank yang kedodoran dalam mengejar target seperti yang diharapkan pemerintah.

Untuk target 20% di tahun 2022 saja, misalnya, baru ada 36 bank yang berhasil mencapainya. Itu pun dengan "tumbal" yang membuat bulu kuduk berdiri: 55 bank dengan kredit bermasalah (*non performing loan/NPL*) kredit UMKM di atas 5%. Bahkan, ada bank dengan *NPL* kredit UMKM di atas 40%.

INI DIA 17 SUBSTANSI ATURAN KREDIT UMKM BI

1. Pembiayaan inklusif adalah penyediaan dana yang diberikan bank untuk UMKM, korporasi UMKM, dan/atau PBR (perorangan berpenghasilan rendah) dalam rupiah dan valuta asing.
2. Bank umum konvensional (BUK) termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), bank umum syariah (BUS), dan unit usaha syariah (UUS) wajib memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan tetap wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.
3. RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi pembiayaan inklusif bank dengan formula perhitungan membandingkan antara hasil pengurangan nilai pembiayaan inklusif dengan nilai sertifikat deposito pembiayaan inklusif terhadap total kredit atau pembiayaan.
4. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap, yaitu paling sedikit sebesar 20% pada posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022; paling sedikit sebesar 25% pada posisi akhir bulan Juni 2023 dan posisi akhir bulan Desember 2023; dan paling sedikit sebesar 30% sejak posisi akhir bulan Juni 2024.
5. Pembiayaan inklusif yang diberikan oleh bank dalam melakukan pemenuhan RPIM, berupa: pemberian kredit atau pembiayaan secara langsung dan rantai pasok; pemberian kredit atau pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha; pembelian surat berharga pembiayaan inklusif; dan/atau pembiayaan inklusif lainnya yang ditetapkan oleh BI.
6. Sumber data untuk perhitungan RPIM diperoleh dari laporan bulanan bank umum; laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan BUS dan UUS; laporan bank umum terintegrasi; dan/atau laporan lain yang ditetapkan BI.
7. Penyampaian laporan lain dilakukan secara luring untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya.
8. BI dapat memublikasikan atas pemenuhan RPIM yang meliputi status pemenuhan RPIM bank secara individual dan nilai RPIM industri perbankan pada kanal situs web BI dan/atau bentuk publikasi lain yang ditetapkan oleh BI.
9. Pengaturan pemenuhan RPIM bagi bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar.
10. BI dapat memberikan bantuan teknis dan penghargaan untuk pengembangan UMKM.
11. BI melakukan evaluasi terhadap kebijakan RPIM paling sedikit 1 kali dalam setahun.
12. BI melakukan pengawasan kepada bank mengenai pemenuhan RPIM melalui *surveilans* dan/atau pemeriksaan.
13. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan RPIM dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis untuk pemenuhan RPIM posisi akhir bulan Juni 2022 dan posisi akhir bulan Desember 2022; dan teguran tertulis dan kewajiban membayar untuk pemenuhan RPIM sejak posisi akhir bulan Juni 2023.
14. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung berdasarkan hasil perkalian antara konstanta sebesar 0,1% dan nilai kekurangan RPIM. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar ditetapkan paling banyak sebesar Rp5 miliar.
15. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar apabila bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan lain dan tidak menyampaikan laporan lain. Sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp1 juta per hari kerja keterlambatan dan sebesar Rp30 juta apabila tidak menyampaikan laporan lain.
16. Pencabutan atas Peraturan BI Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015.
17. Ketentuan lebih lanjut mengenai RPIM diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Sumber: PBI Nomor 23/13/PBI/2021

BANK DENGAN NPL KREDIT UMKM DI ATAS 5 PERSEN

BANK	NPL	BANK	NPL
1. BNI	5,00	29. Bank Panin Dubai Sy.	5,91
2. BSI	5,05	30. Bank Sultra	7,24
3. Bank Permata	8,35	31. Bank NTB Syariah	11,17
4. BTN	31,29	32. Bank Victoria Int.	8,16
5. Bank Panin	6,56	33. Bank BPD Kalsel	13,27
6. Bank Danamon Indonesia	7,05	34. Bank SulutGo	25,36
7. Bank BTPN	7,20	35. Bank Papua	24,80
8. Bank UOB Indonesia	6,72	36. Bank Shinhan Indonesia	8,10
9. Bank Maybank Indonesia	9,16	37. Bank J Trust Indonesia	15,63
10. Bank Jatim	9,62	38. Bank MNC Internasional	11,41
11. Bank BJB	5,83	39. Bank Raya	6,87
12. Bank Mayapada	14,36	40. Bank Commonwealth	8,14
13. Bank Jateng	8,70	41. Bank QNB Indonesia	73,04
14. Bank DBS Indonesia	6,01	42. Bank Sulteng	5,87
15. Bank ANZ Indonesia	5,88	43. Bank BJB Syariah	11,82
16. Bank Sumsel Babel	12,82	44. Bank Amar Indonesia	6,18
17. Bank Sumut	8,84	45. Bank Bumi Arta	5,63
18. Bank Aceh Syariah	7,72	46. Bank of India Indonesia	8,00
19. Bank Riau Kepri	13,58	47. Prima Bank	11,19
20. Bank Kaltimara	14,85	48. Bank Fama International	5,41
21. Bank Muamalat	5,17	49. Bank Neo Commerce	5,07
22. Bank CCBI	6,78	50. Bank KB Bukopin Sy.	11,97
23. Bank KB Bukopin	7,32	51. Bank Victoria Syariah	20,55
24. Bank Artha Graha Int.	16,17	52. Bank SBI Indonesia	44,18
25. Bank Ina Perdana	5,29	53. Bank Ganesha	5,37
26. Bank Kalbar	7,70	54. Bank Banten	43,19
27. Bank NTT	12,20	55. StandChart Bank	6,43
28. Bank Maluku Malut	16,99		

Sumber: Biro Riset Infobank (per September 2021)

Tingginya angka *NPL* menunjukkan tanda-tanda mulai berkembangnya *moral hazard* dalam kredit program tersebut. Ini tentu kurang sehat untuk industri perbankan nasional.

Menurut Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, aturan BI soal RPIM UMKM untuk perbankan minimal 20% di tahun 2022, bahkan 30% di tahun 2024, bisa membahayakan industri perbankan. Sebab, UMKM yang mengalami kenaikan kelas juga masih sedikit. Selain itu, kredit dalam jumlah besar biasanya hanya diperlukan jika kondisi perekonomian sudah stabil dan baik.

“Bahayanya terutama bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4. Mereka harus mengeluarkan biaya infrastruktur yang jumlahnya signifikan; 30% ada yang serap *enggak*? Kalau kita lihat, kenaikan kelas UMKM sangat lamban. Takutnya dipaksakan dan *nggak* terserap. Apalagi ada denda juga,” ujar Aviliani.

Sesuai Peraturan BI tentang RPIM, target kredit UMKM 20%, 25%, dan 30% ternyata menjadi tanggung jawab masing-masing institusi bank. Bukan tanggung jawab kolektif industri perbankan. Jadi, meski secara industri

telah mencapai 25% di tahun 2023, namun jika ada bank yang belum mencapai angka tersebut, tetap akan dikenai sanksi dan denda.

Di lain sisi, jika dipaksakan mengejar target tersebut, sementara tidak semua bank memiliki segmentasi *market* di UMKM, akan berakibat seperti yang terjadi sekarang: tingginya angka *NPL*. Apalagi, munculnya Peraturan BI tersebut sejatinya langkah *overlap* BI. Sebab, terbitnya Peraturan BI tersebut mengintervensi kewenangan otoritas lain.

“Iktikad baik harus dilakukan secara benar dalam koridor kewenangan yang dimiliki BI, tidak *overlap* apalagi mengintervensi kewenangan otoritas lain. Mengatur apa yang harus dilakukan oleh bank hingga kemudian memberikan sanksi kepada bank adalah kewenangan OJK,” ujar Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah.

Benar kata Piter. Niat baik seharusnya diwujudkan dengan cara yang baik juga. Agar hasil yang didapat juga baik, tanpa mengorbankan pihak lain. Jangan jadi simalakama: tak diberi kredit UMKM-nya mati, diberi kredit banknya yang mati. ■

PANGSA KREDIT UMKM BERDASARKAN KEPEMILIKAN BANK

Kelompok	Pangsa (%)
Bank Himbara	60,07
Bank Swasta Nasional	30,04
Bank Pembangunan Daerah	7,97
Bank Asing	1,92

Sumber: Biro Riset Infobank (per September 2021)



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT SEVEN BULLS INVESTAMA

Guna memenuhi Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 105/PMK.03/2009, dan PMK Nomor : 57/PMK.03/2010, (PMK) Nomor : 207/PMK.010/2015, serta seluruh peraturan dan ketentuan terkait lainnya; dengan ini PT Seven Bulls Investama mengumumkan Piutang Yang Nyata - Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto adalah sebagai berikut :

TAHUN 2022 Rp. 2.140.291.147

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata – Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Perusahaan dan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu bersamaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK IBK INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank IBK Indonesia (Bank IBK Indonesia) mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih.

Tahun 2022 : Rp.75.253.588.916

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagaimana tercatat di Bank, akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa.

Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., Ketua Badan Pengawas Perbanas

Resesi di AS By Design, Bankir Harus Lakukan Tiga Hal Ini

Tahun 2023 masih akan menyisakan tantangan berat bagi perekonomian Indonesia. Geopolitik dan kondisi ekonomi di Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok menjadi faktor penentu. Apa yang mesti dilakukan praktisi perbankan nasional?

Situasi geopolitik di Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Tiongkok berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Tak berlebihan kiranya ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan memberikan pesan serius bahwa masyarakat Indonesia harus hati-hati menghadapi kondisi perekonomian di 2023.

Ancaman resesi menjadi salah satu tantangan yang dikhawatirkan akan benar-benar terjadi di Indonesia. Benarkah Indonesia akan memasuki masa resesi di 2023? Apa pengaruhnya bagi industri perbankan nasional? Bagaimana sebaiknya praktisi perbankan nasional menghadapi tantangan resesi di 2023?

Untuk mengetahui seperti apa prediksi kondisi perekonomian di 2023, seberapa berat tantangannya, dan apa yang harus dilakukan praktisi perbankan nasional, simak wawancara *PerbanasNews* dengan Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc., Ketua Badan Pengawas Perbanas yang juga Komisaris Utama Bank Mandiri, berikut ini. Petikannya:

Dalam perspektif Anda, seperti apa kondisi perekonomian global di 2023?

Ada beberapa hal yang memengaruhi perekonomian dunia. Pertama, tensi geopolitik akibat perang Rusia dan Ukraina. Implikasinya adalah kenaikan harga energi, harga pangan, dan dampaknya itu sangat terlihat di Eropa.

Rusia itu salah satu produsen utama gas yang diekspor ke negara-negara Eropa. Sebagai respons dari sanksi Eropa, Rusia membalas dengan mengurangi suplai gas ke negara-negara Eropa. Maka, kalau suplai gas dikurangi, harga gas bisa naik signifikan, sedangkan sebagian besar sumber energi negara Eropa adalah gas. Itulah sebabnya, inflasi di Jerman tahun lalu untuk produsen *price index* sempat

menyentuh 35%. Jadi, akibat kenaikan harga energi, biaya produksinya naik 35%. Maka, ketika gas langka, mau tidak mau negara seperti Jerman harus mencari sumber energi lain.

Apa sumber energi lain yang akhirnya diambil Eropa?

Batu bara, termasuk dari Indonesia. Itu yang menjelaskan harga batu bara naiknya empat kali lipat, dari US\$100 per ton ke US\$400 per ton.

Kalau akibat dari krisis energi ini Jerman inflasinya naik, biaya produksinya naik, mau tidak mau dia akan mengurangi produksinya. Di lain sisi, karena inflasi naik, *interest rate*-nya harus dinaikkan. Kalau Jerman

masuk resesi karena hal ini, mau tidak mau negara Eropa akan masuk dalam resesi karena Jerman negara paling *strong* di Eropa.

Di lain sisi, di Amerika, situasi setelah mobilitas kembali, orang mau belanja. Selama pandemi itu tabungan naik untuk kelompok yang atas, kelompok yang bawah harus di-*spend*. Dalam konteks itu, bisa dibayangkan, orang tidak belanja, punya uang, di saat yang sama Biden (Joe Biden, Presiden AS) mengeluarkan *paycheck*, BLT (Bantuan Langsung Tunai) kayak di kita, yang jumlahnya sekitar US\$1,9 triliun.

Apa yang kemudian terjadi?

Ketika mobilitas balik, tiba-tiba orang bisa belanja, terjadilah yang namanya *pent up demand* atau permintaan yang tertunda. Permintaan begitu besar, sementara di sisi *labor market* terjadi fenomena baru, tidak semua orang mau kembali ke pasar kerja. Ketika semua orang sudah punya tabungan, dapat *paycheck* dari Biden, kalau upahnya tidak tinggi-



tinggi amat, mereka memilih tinggal di rumah. Terjadilah situasi tingkat pengangguran di AS sudah rendah, tapi lowongan pekerjaannya masih tinggi.

Artinya, hampir semua orang sudah kerja, tapi masih kosong pekerjaan karena sebagian orang tidak mau *work from office (WFO)*. Mereka mau kerja sistem *remote*, sementara perusahaan maunya *WFO*. Akibatnya, suplai dari *labor market*-nya berkurang, sementara kebutuhan produksinya naik karena permintaan sehingga pasar tenaga kerja sangat ketat. Kalau permintaan tinggi, suplai *labor*-nya terbatas, upahnya naik. Terjadilah inflasi di AS.

Dengan kondisi demikian, bagaimana cara mengatasinya?

Dibuat upahnya turun. Kalau upahnya turun, harga-harga akan ikut turun. Sementara, tidak bisa menambah suplai karena orang tidak mau kerja. Jadi, cara terbaik untuk menurunkan harga adalah permintaannya diturunkan.

Lantas, bagaimana cara menurunkan permintaan?

Harus dikurangi investasi dan konsumsinya, yaitu dengan menaikkan suku bunga. Itulah kemudian, Larry Summers (mantan Menteri Keuangan AS) bilang, AS membutuhkan resesi untuk *contains inflation*. Jadi, resesi AS itu *by design*. AS sengaja bikin orang menganggur dengan menaikkan suku bunga sehingga perusahaan tidak *hire* pegawai baru. Sehingga, kita lihat The Fed menaikkan suku bunga tinggi.

Apakah The Fed akan menurunkan suku bunga dalam waktu dekat?

Menurut saya, tidak. Karena, *labor market* di AS itu masih ketat. Pengangguran di AS itu 3,7%, padahal dalam situasi normal pengangguran di

sana itu 5%. Jadi, dibutuhkan situasi yang agak panjang agar ekonomi di AS ini turun.

Butuh waktu berapa lama itu?

Akan sangat tergantung pada seberapa ketat pasar tenaga kerja AS. Kalau itu implikasi Biden's Paycheck besar, orang bisa lama di rumah. Jadi, trennya menurut saya, dia mungkin *enggak* akan seagresif kemarin, tapi akan *slow phase* 50%, 25%. Dia persisten di atas sampai *labor market* mulai agak lebih longgar, baru diturunkan. Jadi, saya tidak melihat bahwa *interest rate* itu bisa turun dalam waktu dekat.

Berdasarkan pemaparan tadi, jika AS dan Jerman resesi, apa dampaknya terhadap perekonomian dunia?

Jerman dan AS adalah dua negara motor ekonomi dunia. Kalau Jerman masuk resesi, *global growth* pasti melambat, permintaan ekspor dari negara berkembang, termasuk Tiongkok, pasti turun. Kalau negara berkembang turun, mau tidak mau Indonesia pasti kena.

Seberapa serius dampak tersebut bagi Indonesia?

Tiongkok yang mulai membuka diri (dalam ekspor batu bara) berarti produksinya akan makin naik. Sehingga, harga batu bara sekarang mulai mengalami penurunan. Kita bisa lihat *share price* dari perusahaan-perusahaan batu bara harganya tidak setinggi dulu lagi. Jadi, ini berpengaruh terhadap ekspor kita.

Seberapa besar dampaknya terhadap ekspor kita?

Logikanya, cara terbaik untuk tidak kalah dalam piala dunia adalah dengan tidak ikut. Saya gunakan logika yang sama. Cara terbaik untuk tidak terpengaruh efek negatif global adalah dengan tidak terintegrasi pada global.

Sekarang Indonesia *share* dari ekspor terhadap *GDP (gross domestic product)* hanya 25%. Jadi, kalau ada apa-apa di global, yang hilang itu 25%. Bandingkan dengan Singapura yang 180%. Singapura itu akan jatuh ekonominya. *Growth*-nya akan lambat. Semua negara yang tergantung ekspor akan kena.

Jadi, ekspor Indonesia yang relatif kecil ini memang disengaja agar tidak terlalu terdampak kondisi ekonomi global?

Tidak. Kita ingin seperti Singapura. Tapi, karena kelakuan kita yang macam-macam, berbelit-belit, akhirnya kita tidak kompetitif. Memang kita diuntungkan sekarang. Tapi, di lain sisi, dari mata uang adalah, kalau nanti ekonomi global *recovery*, Singapura akan tumbuh cepat. Kita lambat. Kemudian, sejelek-jeleknya harga batu bara, permintaannya masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan 2021. Jadi, ekspor kita masih agak lumayan.

Bagaimana dampaknya terhadap sektor keuangan?

Kalau The Fed menaikkan bunga, BI (Bank Indonesia) punya dua pilihan. Satu, fokus pada inflasi domestik, tidak peduli kondisi di luar. Kalau itu yang dipilih, investor melihat *return* untuk meletakkan uang di AS lebih menarik dibandingkan di Indonesia. Akibatnya, rupiah jatuh. Maka, opsi kedua untuk BI, selain menahan inflasi, mau tidak mau harus menaikkan bunga agar uang investor tidak keluar. Itu yang kita lihat sekarang, kenaikan suku bunga BI terjadi.

Fed Fund Rate saya tidak bisa prediksi, tapi saya *enggak* akan *surprise* kalau The Fed akan menaikkan bunga sampai 50% atau lebih. Sekarang *'kan* di 4,25 *bps*. Jadi, saya tidak akan *surprise* kalau The Fed menaikkan sampai 5% atau 5,25 *bps*. Kalau Fed Fund Rate sampai 5% atau 5,25%, BI Rate tidak mungkin di 5%. Mungkin BI Rate akan ada di kisaran 6% ke atas atau mendekati 7%. Ini berimplikasi terhadap perbankan.

Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Sc.,

Lahir di Jakarta, 22 Agustus 1965, Muhammad Chatib Basri adalah ekonom, peneliti, dan profesional yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) sejak 21 Mei 2013 hingga 20 Oktober 2014. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 14 Juni 2012 hingga 1 Oktober 2013.

Keahliannya terutama di bidang makro-ekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Ia pernah duduk sebagai Penasihat Khusus Menteri Keuangan RI (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008), dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010). Saat ini, selain menjadi Komisaris Utama Bank Mandiri, ia mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan aktif di Perbanas sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Dengan kondisi global dan kebijakan moneter seperti itu, apa harapannya dari kebijakan fiskal?

Sumber dari kebijakan ekonomi itu eksternal, eksternalnya drop. Moneter, moneternya naik. Tinggal fiskal. Bu Sri Mulyani sudah mengatakan, tahun 2023 defisit anggaran harus di bawah 3%. Apa implikasinya? Dia akan melakukan *tightening*. Kalau demikian, maka akan terjadi kontraksi fiskal. Kecuali kalau kualitas belanja pemerintah difokuskan pada sektor yang bisa meningkatkan *purchasing power* atau berdampak untuk mendorong *growth*.

Seperti apa contohnya?

Saya dari awal berpendapat, fokus belanjanya dengan memberi BLT kepada masyarakat. Karena, masyarakat, terutama kelas bawah, pasti akan belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beda dengan orang kaya. Orang kaya, kalau diberi BLT seperti yang di AS, akan ditabung.

Saya suka bercanda, hemat pangkal kaya adalah istilah yang bagus untuk individu. Tapi, coba bayangkan kalau seluruh masyarakat Indonesia semuanya menabung, tidak ada yang belanja, maka ekonomi Indonesia akan turun. Kalau kondisinya seperti itu, pemerintah yang harus belanja. Konsep stimulus seperti itu. Pemerintah harus masuk di situ. Memberikan BLT, misalnya, supaya *purchasing power*-nya ada. Begitu ada permintaan, maka akan mulai aktivitas ekonominya.

Ingat waktu COVID? Tingkat bunga sudah diturunkan, apakah bank memberi pinjaman? Tidak terjadi 'kan? Kenapa? Bukan bank tidak mau memberi pinjaman, tapi tidak ada yang minta. Jadi, dalam konteks ini, permintaannya dulu yang harus dihidupkan.

Dengan kondisi seperti itu, bagaimana prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2023?

Saya percaya, probabilitas resesi kita itu kecil. Kenapa? Karena, ekspornya *limited*. Kemudian, belanjanya akan dialokasikan pada yang mempunyai *purchasing power* (*social protection*) sehingga bisa mendorong pertumbuhan. Saya prediksi *growth* kita ada di kisaran 4,5%-5%. Pada 2008 situasinya jauh lebih parah daripada sekarang karena *global gross growth* -1,3%. Sekarang *global growth* masih diperkirakan 1,7%. Kalau 2008 saja kita masih tumbuh 4,6%, masa, sekarang tidak lebih tinggi dari itu? Karena itu, saya tidak semuram yang disampaikan orang-orang.

Seperti apa implikasinya terhadap industri perbankan Indonesia?

Kalau bicara bank, ini agak sedikit detail, soalnya perbankan kita terfragmentasi. Ada yang BUKU 4 (sekarang kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI). Dalam situasi seperti ini, yang terjadi adalah *flight to quality*, orang cari bank yang aman buat dia. Mungkin akan terjadi perpindahan dari bank-bank kecil ke bank besar. Kalau ini yang terjadi, bank-bank besar relatif oke likuiditasnya.

Bagaimana dengan bank kecil? Apalagi, di saat yang sama, BI menaikkan bunga dan GWM (giro wajib minimum)



Foto: net

sehingga likuiditas jadi ketat. Dalam kondisi likuiditas ketat, mau tidak mau segmen bank yang relatif kecil harus mobilisasi dana. Caranya dengan menaikkan bunga. Kalau tidak, tidak ada yang *naruh* uang. Begitu dia menaikkan suku bunga, *price war*, perang bunga terjadi.

Apa saja yang harus dilakukan perbankan untuk menghadapi kondisi seperti itu?

Dalam konteks itu, saya melihat perbankan harus melakukan tiga hal. Satu, melakukan *stress test*. Dua, pastikan portofolio oke tidak dan CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai)-nya cukup tidak. Tiga, pastikan modalnya cukup tidak. Jadi, ini bukan kondisi yang mudah buat bank di 2023, kecuali mereka yang sudah punya persiapan sebelumnya.

Efeknya akan sangat berbeda pada bank. Ada bank yang punya masalah pada likuiditas, ada bank yang likuiditasnya relatif *ample*. Ini yang harus diantisipasi perbankan dan regulator.

Bank harus menyiapkan 'celengan semar'?

Betul. Dalam hal ini, bank harus konservatif. Dalam artian, jangan karena tidak mau profitnya kecil, akibatnya tidak mau meletakkan di CKPN. Kalau bank konservatif, dia akan jaga-jaga. Mungkin profitnya relatif kecil, tapi dia aman. Masalahnya, apa semua bank punya kapasitas seperti itu?

Selain memperkuat likuiditas, apa lagi yang perlu diperhatikan perbankan?

Tadi saya bilang, *stress test*. Karena, ada sektoral yang punya *impact*. Misalnya, sektor sumber daya alam, harganya mulai mengalami penurunan. Dia harus punya implikasi atau sektor yang impor kontennya relatif besar. Dengan rupiah yang mengalami depresiasi, akan ada tekanan. Kemudian, ada *balance sheet effect*. Kalau modalnya dari luar, harus memberikan repatriasi profitnya dalam dolar AS 'kan? Atau, bank meminjamkan perusahaan, sedangkan perusahaan ini *capex*-nya dalam dolar AS karena sebagian mesinnya impor. Sementara, *revenue*-nya dalam rupiah. Berarti, perusahaan akan mengalami kontraksi.

Jadi, ini era di mana perbankan harus *put your finger on*

the pulse, meletakkan jari kita di nadi untuk monitor dengan hati-hati. Saya tidak bilang bahwa situasi ini *'doomsday'*. Karena, meskipun kondisi harus hati-hati, tapi tidak seburuk 2008.

Kalau tak seburuk 2008 dan kondisi ekonomi mulai membaik, apakah masih perlu kebijakan restrukturisasi?

Sekarang kalau kita lihat *NPL* (*non performing loan*), relatif kecil. Tapi, kalau lihat *LAR* (*loan to asset ratio*), berapa sekarang? 15%? 16%? Dengan kenaikan bunga, akibatnya bukan tidak mungkin ada perusahaan yang harus masuk ke dalam restrukturisasi. Katakanlah, dari yang 15% ini, 30% macet. Jadi, 5% itu lebih dari batas OJK untuk bank sehat. Artinya, harus dijaga benar-benar. Dan, 5% dari total *outstanding* yang Rp7.000 triliun atau Rp350 triliun itu berarti ada bank yang harus *inject capital*. Ada bank yang harus menyiapkan CKPN. Ini yang harus dijaga hati-hati. Risikonya *managable*, selama pengelolaannya baik.

Treatment tiap bank berbeda ya?

Makanya, regulator juga harus melihat itu dengan bijak. Misalnya, *cost of fund* di bank besar itu bisa turun, tapi *not necessary* di bank yang kecil.

Jika bisa disimpulkan, terkait dengan resesi, industri perbankan kita relatif aman?

Relatif aman. Bandingkan dengan COVID, lebih berat COVID.

Dengan kondisi seperti sekarang ini, bagaimana dengan masa depan *green financing*?

Saya kebetulan ikut juga di *high level* untuk *sustainable growth* yang dibuat IMF dengan World Bank. Saya lihat, *issue* dari *climate* soal yang sangat serius. Bahkan, ada kekhawatiran kalau aksinya lambat, tidak hanya 1,5 derajat kenaikan temperatur, bahkan bisa lebih. Kalau itu yang terjadi, biayanya jadi lebih mahal. Jadi, semua negara harus *take action* dengan ini.

Bagaimana implikasinya terhadap sektor keuangan?

Orang akan didorong menuju aktivitas yang *green*. Dan, kalau aktivitas *dirty*, *cost of fund*-nya jadi mahal. Agar orang membuat aktivitas *green*, caranya di-*punish* dengan *cost of fund* mahal kalau dia membiayai aktivitas yang tidak ramah lingkungan. Ini sudah mulai dilakukan, termasuk di Indonesia. Misalnya, PLN akan me-*retire*-kan PLTU. Masalahnya, orang mau melakukan kalau ada *financing*. Saya lihat kecenderungan dari *green finance* ini akan muncul ke depan.

Jadi, sektor perbankan harus mulai mempersiapkan diri untuk *green finance* karena *whole of fund*, *source of fund*-nya itu akan mengarah ke sana. Ini terutama akan berpengaruh pada perusahaan yang *public listed*. Kalau perbankan yang *public listed* tidak *comply* dengan ini, yang *punish* itu investornya. Dia tidak akan beli sahamnya. Maka, akan ada *pressure* ke arah sana, apalagi kalau dia *foreign bank*, *pressure*-nya akan sangat tinggi.

Transisi seperti ini yang harus disiapkan perbankan. Ini bukan hal mudah karena kalau ingin membiayai *project financing*, juga harus memasukkan *ESG* (*environmental, social, governance*). Mau tidak mau, harus jadi faktor yang perlu diperhatikan. Bukan hal mudah memenuhi *ESG*. Bukan hanya

tidak mudah, tapi juga harus banyak yang perlu disiapkan. Implikasinya, *cost of fund*-nya jadi mahal. Karena itu, harus ada upaya untuk menurunkan *financing*.

Lantas, bagaimana caranya agar *cost of fund green finance* ini menjadi lebih murah?

Salah satu cara, misalnya, aktivitas yang *green* itu masuk dalam *high quality asset*. Kalau bank itu memasukkan aktivitas ke dalam *high quality*, *cost of fund*-nya jadi lebih kecil karena dianggap tidak berisiko. Tapi, kalau berisiko, *cost of fund*-nya akan jadi mahal. Pertanyaan saya, bisa tidak ini dilakukan *reform* di mana *green activities* masuk dalam *high quality asset*? Dengan begitu, perbankan di seluruh dunia akan ada insentif untuk mendorong *green finance* karena *cost of fund* jadi lebih kecil.

Kalau dari industrinya, langkah apa untuk menuju ke sana?

Yang paling standar adalah ketika memberikan *lending* mulai memasukkan faktor *ESG*. Kita lihat di situ, misalnya, proyeknya ramah lingkungan tidak. Ini mempunyai implikasi di dua sisi: perusahaannya harus menunjukkan, bank juga harus paham, dan ini butuh sesuatu.

Apa pesan Anda untuk anggota Perbanas?

Tahun 2023 ini bukan tahun yang mudah, terutama untuk yang di perbankan. Jadi, buka mata lebar-lebar, lakukan *stress test*. Karena, itu implikasinya bisa ke mana-mana. Tapi, situasi ini tidak seberat 2008, saat COVID. Jadi, kalau menggunakan strategi yang benar, tetap *prudent*, saya yakin kita bisa melewati situasi seperti ini. Komunikasi dengan regulator juga sangat penting dalam situasi seperti ini supaya mereka juga *aware* situasinya seperti apa. Implikasi ke bank berbeda satu sama lain. Jadi, tidak bisa sebuah kebijakan dibuat *one size fits all*.

Kapan kira-kira *interest rate* bisa mulai *slowdown*?

Dugaan saya, The Fed tidak akan menurunkan *interest rate* segera. Dia naik dengan *slow phase*, kemudian dia akan bertahan, kemudian ketika pasar tenaga kerjanya mulai *lose*, baru mulai turun. Perkiraan saya, di akhir 2023. Tapi, inflasi di Indonesia setelah September bisa drop. Karena, September 2022 kita menaikkan harga BBM, itu ada efek antartahun.

Makanya, ketika BI memprediksi di akhir 2023 inflasinya kembali ke 3%-an, menurut saya masuk akal. Di situ mungkin ada ruang buat BI. Tapi, tergantung juga ke The Fed. Karena, kalau BI menurunkan, sedangkan The Fed-nya masih di atas, implikasinya ke rupiah. Jadi, kita juga harus melihat perkembangan itu.

Untuk bank, yang harus diperhatikan juga *balance sheet effect* dari debitemnya. Mereka kalau *revenue*-nya dalam rupiah, *capex*-nya dalam dolar AS, pasti *company*-nya kontraksi. Itu yang juga harus dijaga baik-baik.

Jadi, tahun 2023 adalah tahun di mana *bankers* itu tidak bisa libur. *It's not time to take vacation*. Masalahnya adalah tidak semua bank sama. Ada yang mungkin akan menikmati dengan kondisi saat ini karena *liquidity* masih relatif *ample*. *Challenge* buat regulator juga tidak mudah. Karena itu, komunikasi antara regulator dan perbankan (Perbanas) penting untuk dapat *feedback*-nya seperti apa. ■

Momentum Green Banking Saat Harga Batu Bara Melandai

Penerapan *green banking* di Indonesia adalah satu keniscayaan di tengah tren global yang mengarah ke ekonomi berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum optimal. Sampai kapan?

Pasca-kesepakatan Paris 2015 untuk perubahan iklim, dunia internasional setuju untuk mengantisipasi dampak dari pemanasan global akibat aktivitas ekonomi. Salah satu poin penting yang disepakati 195 perwakilan negara, termasuk dua negara penghasil emisi karbon terbesar, yakni Amerika Serikat dan Tiongkok, adalah menghentikan suhu pemanasan bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius dan memasukkan komitmen mengenai berapa banyak emisi karbondioksida yang akan dikurangi.

Bagi dunia usaha, khususnya sektor perbankan, implementasi dari kesepakatan yang mengikat (*legally binding*) dalam Kesepakatan Paris adalah penerapan investasi berbasis *environmental, social, dan governance (ESG)* dalam setiap aktivitas bisnis perbankan. Konkretnya, bank perlu mempertimbangkan porsi kredit yang diberikan untuk sektor yang dinilai merusak lingkungan, seperti pertambangan batu bara. Konsep inilah yang dikenal sebagai *green banking*.

Bagi praktisi perbankan di Indonesia, poin dari Kesepakatan Paris sejatinya bukan hal baru. Bahkan, Indonesia sebetulnya telah mengimplementasikan ESG Investment sejak 2009 atau enam tahun sebelum Kesepakatan Paris. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan perbankan yang memasukkan ESG Investment sebagai salah satu kriteria.

Bahkan, regulator pun telah membuat aturan tentang ESG, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Namun, meski sudah ada aturan, hingga saat ini belum semua bank di Indonesia menerapkan ESG Investment.

Bahkan, berdasarkan laporan terbaru Institute for Essential Services Reform (IESR) bertajuk "Indonesia Sustainable Finance Outlook 2023" yang dipublikasikan Oktober 2022, terungkap belum banyak bank di Indonesia yang mengumumkan langkah-langkah untuk membatasi alokasi kredit ke sektor pertambangan.

Dalam kajian tersebut dijelaskan, pada Mei 2022 BRI



mengumumkan akan menghentikan alokasi kredit ke sektor bahan bakar fosil dan akan mempertahankan persinya dalam portofolio kredit sektor bahan bakar fosil di bawah 3% yang terdiri atas perjanjian kredit yang ada. Jadi, dari Rp177,6 triliun dari total portofolio kredit korporasi BRI pada kuartal I 2022, sebanyak 3% disalurkan ke batu bara atau setara dengan Rp5,3 triliun.

Meski saat ini harga batu bara mulai menurun setelah meredanya ketegangan di Rusia, menurut proyeksi International Energy Agency (IEA), permintaan batu bara masih akan naik sampai dengan 2025. IESR memperkirakan ekspor batu bara Indonesia akan mulai turun setelah 2025 karena transisi energi dan kebijakan penurunan emisi di India dan Tiongkok yang akan membuat konsumsi batu bara stagnan, bahkan turun.

Hal itu bisa menjadi momentum bagi praktisi perbankan nasional untuk menerapkan *green banking*, yakni secara signifikan mengurangi porsi kredit bank ke sektor pertambangan. Secara teknis, bank hanya mengucurkan kredit untuk perusahaan yang memenuhi standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (*ESG*) dalam kerangka untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Jadi, dengan *green banking*, korporasi perbankan tidak hanya fokus pada laba sebesar-besarnya, tapi juga harus memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta, serta meningkatkan kesejahteraan sosial pada masyarakat. ■



PT. JOTUN INDONESIA

Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009, yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 207/PMK.010/2015 tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. PT Jotun Indonesia, NPWP No. 01.071.174.5-052.000 yang beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok KK-1 Jatiwangi, Cikarang Barat Bekasi, dengan ini mengumumkan Piutang Yang nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun buku 2022 sebesar Rp. 797.426.040,- dengan rincian sebagai berikut:

NAMA DEBITUR	NPWP	ALAMAT	PLAFON UTANG YANG DIBERIKAN	JUMLAH PIUTANG TIDAK TERTAGIH (Rp)
MANDALA PUTRA	-	JL.RAYA PADJAJARAN NO.78M BOGOR	90.000.000	47.511.144
PT. PERKASA HEAVYINDO ENGINEERING	01.679.117.0-439.000	JL.RAYA PABUARAN DS.KARANG MUKTI, PABUARAN SUBANG	100.000.000	85.000.000
PT. ZHEJIANG TENAGA PEMBANGUNAN INDONESIA	76.417.116.1-028.000	APL OFFICE TOWER PODOMORO CITY LT.19 BLOKT9 JL.LETJEN S.PARMAN KAV28 RT/RW 12/6 TJ DUREN SLTN GROGOL PETAMBURAN JKT BARAT DKI JAKARTA	100.000.000	47.965.500
IRFAN FAHRI (TOKO PACIFIC BANGUNAN)	74.533.347.6-015.000	JL. KP MELAYU KECIL I RT. 014 RW.010 BUKIT DURI TEBET JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA	150.000.000	90.708.626
PT. WIJAYA PERDANA	01.137.180.4-062.000	JL.RS.FATMAWATI NO. 1-B CILANDAK BARAT CILANDAK-JAKARTA SELATAN	50.000.000	32.931.360
PT. ZHONGBO INTERNATIONAL KONSTRUKSI	03.250.591.9-044.000	RUKAN MANGGA DUA SQUARE BLOK F35AB LT. 3 ANCOL PADEMANGAN JAKARTA UTARA DKI JAKARTA	300.000.000	137.558.410
BUT. HUBEI INDUSTRIAL CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD.	31.641.417.6-036.000	PODOMORO CITY RUKO GARDEN SHOPPING ARCADE BLOKB/8 DH JL.S.PARMAN TJDUREN SELATAN GROGOL PETAMBURANJAKARTA BARAT DKI JAKARTA RAYA11470	500.000.000	355.751.000
JUMLAH				797.426.040

Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Perusahaan yang telah dibebankan dalam laporan keuangan komersial dan daftar tersebut akan diserahkan ke kantor Pelayanan Pajak PMA I, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.



PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015, dengan ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2022 sebagai berikut:

Tahun 2022

Rp2.384.023.350.358,00

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022 sebagai Lampiran.

Banyak Jalan Menuju Modal Inti Tiga Triliun

Meski terseok-seok, hampir semua bank bisa memenuhi persyaratan modal inti sebesar Rp3 triliun. Hanya satu bank yang terkena penalti dan harus berganti baju menjadi BPR.

PT Prima Master Bank atau Prima Bank menutup 2022 dengan duka mendalam. Bank umum swasta nasional (BUSN) yang berdiri sejak 1 November 1989 dengan nama Inter Asia Pacific Bank ini harus menanggalkan bajunya sebagai bank umum. Dia dipaksa harus keluar dari kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 karena tak sanggup memenuhi ketentuan permodalan, dan diminta berganti baju menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, semua bank umum diwajibkan memiliki modal inti minimum Rp3 triliun hingga 31 Desember 2022. Agar tidak turun kelas menjadi BPR seperti Prima Bank, ada lima opsi yang disarankan OJK: suntik modal dari pemegang saham, merger, akuisisi, mengundang investor strategis, atau bergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB).

Dari 37 BUSN dan bank milik pemerintah daerah (bank pembangunan daerah/BPD) yang memiliki modal inti kurang dari Rp3 triliun hingga menjelang akhir tahun, sebagian besar memilih opsi pertama, yakni melakukan penambahan modal. Para pemegang saham secara bersama-sama menambal kekurangan modal melalui *right issue*. Sejauh ini, ada 11 bank yang telah mengumumkan keberhasilannya memenuhi modal inti Rp3 triliun melalui skema tersebut.

Ke-11 bank tersebut adalah Bank Maspion, Bank Amar Indonesia, Bank Capital, Bank Neo Commerce, Bank Oke Indonesia, Bank J Trust Indonesia, Krom Bank Indonesia, Bank Victoria, Bank Ina Perdana, Bank Ganesha, dan Bank Aladin. Dari lima skema, opsi menambah modal adalah opsi yang paling simpel dan realistis. Sebab, opsi ini tidak mengubah komposisi pemegang saham secara signifikan.

Berbeda dengan opsi lainnya, masing-masing memungkinkan terjadinya perubahan komposisi pemegang saham, baik dari sisi jumlah kepemilikan saham maupun dari sisi pengendalian perusahaan. Terlebih jika yang diambil adalah opsi akuisisi atau pengambilalihan dan

DAFTAR 11 BANK YANG PENUHI MODAL INTI DENGAN SUNTIKAN MODAL

NO	BANK	MODAL INTI LAMA	MODAL INTI BARU	SKEMA PEMENUHAN
1.	Bank Maspion	Rp1,4 triliun	Rp3,1 triliun	Right issue Rp1,7 triliun
2.	Bank Amar Indonesia	Rp1,8 triliun	Rp3,1 triliun	Right issue Rp1,28 triliun
3.	Bank Capital	Rp2,08 triliun	Rp3,38 triliun	Private placement Rp1,3 triliun
4.	Bank Neo Commerce	Rp2,25 triliun	Rp3,95 triliun	Right issue Rp1,7 triliun
5.	Bank Oke Indonesia	Rp2,96 triliun	Rp3,46 miliar	Right issue Rp500 miliar
6.	Bank JTrust Indonesia	Rp2,76 triliun	Rp3,12 triliun	Right issue Rp360 miliar
7.	Krom Bank Indonesia	Rp2,13 triliun	Rp3,41 triliun	Right issue Rp911 miliar
8.	Bank Victoria	Rp2,5 triliun	Rp3,24 triliun	Right issue Rp743 miliar
9.	Bank Ina Perdana	Rp2,3 triliun	Rp3,5 triliun	Right issue Rp1,2 triliun
10.	Bank Ganesha	Rp2,1 triliun	Rp3 triliun	Right issue Rp900 miliar
11.	Bank Aladin	Rp2 triliun	Rp3,19 triliun	Right issue Rp1,09 triliun

Sumber: Keterbukaan Informasi

merger. Sejauh ini, hanya dua bank yang mengambil opsi merger. Namun, OJK belum memublikasikan dua bank yang tengah berencana "kawin" itu.

"Kami tidak bisa menyebutkan nama bank yang merger. Merger merupakan bagian dari aksi korporasi yang harus dikoordinasikan dengan otoritas di bursa efek sehingga tidak bisa disebutkan karena akan berpengaruh pada harga saham," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Opsi yang terbilang baru adalah penyelesaian dengan skema KUB. Opsi ini cukup menarik. Sebab, bank tidak mempunyai kewajiban memenuhi modal inti hingga Rp3 triliun, asalkan sudah bergabung dengan bank lain dalam payung KUB. Selain itu, pemegang saham bank yang akan masuk sebagai anggota KUB bisa menentukan besaran suntikan modal yang ingin diberikan kepada mereka. Sehingga, relatif tidak terlalu mengubah komposisi pemilik saham secara signifikan.

Bahkan, skema KUB memunculkan banyak peluang bagi bank bersangkutan. Sebab, antarbank yang masuk dalam anggota KUB bisa saling melakukan *channeling*. Inilah skema yang akan diambil Bank NTB Syariah demi menutupi kewajiban modal inti Rp3 triliun.

"Ini masih proses penjajakan. Ada tiga bank daerah yang salah satunya akan menjadi induk dari Bank NTB Syariah," ungkap Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma. Ketiga calon bank induk itu adalah Bank DKI, Bank BJB, dan Bank Jatim. Jika dilihat secara kedekatan bisnis, sepertinya Bank NTB Syariah akan merapat ke Bank Jatim. ■

Siapa Paling Kompeten Menjadi Pengawas Koperasi?

Koperasi simpan pinjam membutuhkan pengawas dalam operasionalnya. Namun, belum ada titik temu. Siapa yang paling kompeten?

Semua berawal dari Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang diajukan pemerintah. RUU tersebut akan memberikan mandat baru kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni memberikan pengawasan kepada koperasi simpan pinjam (KSP). Selama ini, KSP diawasi oleh pengurus koperasi itu sendiri, baik melalui rapat anggota maupun badan pengawas yang berasal dari pengurus koperasi.

"OJK akan diberi mandat mengatur koperasi simpan pinjam, aktivitas aset digital termasuk aset kripto, dan inovasi teknologi sektor keuangan," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis, 10 November 2022.

Setali tiga uang dengan yang dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki. Menurut dia, pengawasan koperasi di bawah OJK diharapkan bisa memberikan kepastian hukum terhadap pelaku maupun konsumen. Pasalnya, di dalam aturan yang berlaku saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawasan koperasi dilakukan oleh koperasi itu sendiri. Bahkan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) di dalam aturan tersebut tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.

Dalam RUU P2SK, nantinya KSP akan diintegrasikan dengan seluruh sistem keuangan nasional. Hal ini juga bertujuan memberikan pengawasan yang ketat dari pemerintah. "Selama ini bila ada masalah yang terjadi di koperasi, pemerintah tidak bisa banyak campur tangan. Penyelesaiannya harus melalui pengadilan PKPU," jelas Teten.

Saat ini, RUU P2SK tengah digodok Komisi XI DPR. Namun, sebagian fraksi di DPR menolak RUU terkait koperasi tersebut dengan berbagai alasan. Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyatakan bahwa roh koperasi adalah kekeluargaan dan gotong royong, sehingga kurang tepat jika pengawasan dilakukan oleh OJK seperti perbankan.

"Dalam pandangan kami, tidak boleh melihat koperasi sebagai industri layaknya bank pada umumnya sehingga (pengawasannya) ada di OJK. Rohnya (koperasi) tidak dalam pengawasan OJK, tapi kita lihat nanti DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)-nya seperti apa," ujar Ecky dalam Rapat Panja di Komisi XI DPR RI, Kamis, 24 November 2022.

Menurut Wartiah dari Fraksi PPP, koperasi akan kehilangan jati dirinya jika diawasi OJK. Pengawasan koperasi lebih tepat di bawah Kemenkop UKM. Sebab, koperasi adalah sekumpulan orang, bukan uang.

"Kita terbuka saja, tapi bagaimana regulasi itu memberi ruang dan mendorong yang koperasi dari dan untuk anggota itu bisa tumbuh berkembang menjadi pilar ekonomi bangsa ke depan," tambah Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra, Gus Irawan Pasaribu.

Penolakan DPR sejalan dengan sikap beberapa pengurus koperasi. Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi), misalnya, berpendapat, prinsip



dasar dan asas koperasi berbeda dengan bank.

"Koperasi bersifat gotong royong dan kekeluargaan dan juga mempunyai *self regulation*, di mana regulasi itu sangat berbeda dengan OJK," ujar Ketua Umum Forkopi, Andy Arslan Djunaid.

Aturan OJK, kata dia, selalu bicara tentang sanksi, denda, dan pidana. Hal ini sangat berbeda dengan prinsip yang diusung dengan koperasi. "Kami berharap, pengawasan koperasi ada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM," usul Andi.

Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) berbeda pendapat dengan Forkopi. Ketua Akses, Suroto, menegaskan, mekanisme pengawasan koperasi berbeda dengan bank umum. Menurutnya, untuk koperasi yang dimiliki, dimodali, dikelola, dan dikontrol secara demokratis oleh anggotanya, cukup dipastikan kepentingan anggotanya terjaga.

"Petugas Kemenkop UKM tidak memiliki kompetensi untuk dukung penyelesaian masalah koperasi. Satgasnya isinya kurator yang tidak mengerti mekanisme kerja koperasi. KSP merupakan lembaga keuangan milik nasabahnya sendiri," tegasnya. ■

Peringati 17 Tahun Berbakti, IBI Gelar Turnamen Golf

Di hari ulang tahunnya ke-17, Ikatan Bankir Indonesia (IBI) menggelar turnamen golf hasil kolaborasi tiga asosiasi: IBI, Perbanas, dan BARa.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI) berkolaborasi dengan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Bankers Association for Risk Management (BARa) menggelar “IBI Golf Tournament 2022” dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 IBI pada Sabtu, 10 Desember 2022, di Pondok Indah Golf Course, Jakarta. Kegiatan tersebut didukung oleh institusi perbankan nasional, di antaranya BSI, BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, BJB, Maybank, Bank Mantap, Bank Danamon, dan J Trust Bank.

Turnamen golf berhadiah total ratusan juta rupiah yang diramaikan oleh 114 peserta dari industri perbankan, Pegadaian, dan asuransi itu juga dihadiri oleh Badan Pengawas, Badan Pengurus, dan Anggota IBI, Perbanas, dan BARa, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Kiranya acara yang dilakukan dengan kolaborasi yang baik antar-asosiasi perbankan maupun industri keuangan seperti ini dapat terus berjalan,” ujar Ketua Bidang Olahraga IBI dan Ketua Bidang Organisasi Perbanas, Hery Gunardi, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 12 Desember 2022.

Ketua Umum IBI, Haryanto T. Budiman, berharap, kolaborasi antara IBI, Perbanas, dan BARa dalam rangka memperingati HUT ke-17 IBI ini dapat menjadi wadah pemersatu bankir dan praktisi keuangan nasional dalam memajukan perekonomian nasional. “Meski kami berada pada bisnis yang sama, namun kami dapat bersatu untuk itu,” ujar Haryanto T. Budiman dalam kesempatan yang sama.

Direktur Eksekutif IBI, Eko Taufik Wibowo, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan pendukung acara IBI Golf Tournament 2022 sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Semoga kolaborasi yang baik antar-asosiasi ini dapat terus berlanjut dan semakin erat,” ungkap Eko Taufik Wibowo.

Selain berhadiah total ratusan juta rupiah, turnamen golf tahunan ini juga dimirahkan dengan berbagai *door prize* untuk peserta, di antaranya 1 unit Vespa Primavera, 3 unit jam digital Garmin S62, 4 unit logam mulia masing-masing seberat 5 gram, 8 unit voucher Golf Palm Hill, 6 unit voucher MAP masing-masing senilai 500 ribu, dan 8 unit voucher Lotte masing-masing senilai 500 ribu. ■

Berikut ini daftar pemenang “IBI Golf Tournament 2022”:

BEST NETT OVERALL: Dadun
BEST GROSS OVERALL: Jamsik

MEN FLIGHT

FLIGHT A

- BEST NETT 1: Ahmad Nasrullah
- BEST NETT 2: Bambang K.
- BEST NETT 3: Aditijanto

FLIGHT B

- BEST NETT 1: Herry H.
- BEST NETT 2: Ngatari
- BEST NETT 3: Dwi S.

LADIES FLIGHT

- BEST NETT: Suwartini

SKILL

- LONGEST DRIVE: Sandy
- NEAREST TO THE LINE: Jamsik
- NEAREST TO THE PIN: Sinom



PT Bank Pembangunan Daerah Bali menampilkan berbagai terobosan dan inovasi dalam menyikapi perkembangan transformasi digital yang pasca pandemi pergerakannya semakin cepat. Untuk meningkatkan aktifitas jasa perbankan dan mengoptimalkan pelayanan serta meningkatkan *Brand Awareness* PT Bank Pembangunan Daerah Bali khususnya terkait dengan fitur produk dan layanan maka perlu dilakukan pengembangan produk layanan, untuk bersama-sama memasarkan produk Uang Elektronik dengan nama Balipay Bank BPD Bali.

Balipay Bank BPD Bali yang merupakan uang elektronik *server based* yang inovatif dan praktis dihadirkan untuk membantu kebutuhan finansial bagi masyarakat Bali yang tujuan utamanya mendukung ekosistem ekonomi di Bali, baik di dunia pariwisata atau bisnis lainnya dengan harapan dengan Balipay Bank BPD Bali bisa menuju *one island one solution*. Balipay Bank BPD Bali merupakan inovasi *digital payment* yang memudahkan transaksi *digital payment* di berbagai *merchant*, pembayaran pajak, pembayaran donasi dan lainnya. Dengan layanan Balipay Bank BPD Bali masyarakat yang belum begitu mengenal perbankan dapat melakukan transaksi keuangan lebih mudah. Penggunaan Balipay Bank BPD Bali dapat membantu kelancaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal, cepat dan mikro.

Produk ini membantu masyarakat dalam kegiatan *Cash Less Society* dimana menciptakan budaya bertransaksi tidak menggunakan Uang Tunai sebagai alat pembayaran melainkan menggunakan Aplikasi pembayaran dengan sarana *Mobile* (Android dan Ios). Disisi lain, Balipay Bank BPD Bali dapat digunakan untuk penetrasi pasar dalam menggarap UMKM, pembayaran pajak dan transaksi lainnya di Bali, tentunya hal tersebut akan memberikan imbas bagi penetrasi seluruh sektor ekonomi yang ada di Bali. Merujuk pada Bali yang terkenal sebagai salah satu tujuan wisata favorit dunia, Balipay dapat menonjolkan kemudahan untuk membayar kontribusi wisatawan, solusi perbankan Bank BPD Bali ini lebih mudah diakses oleh siapa saja tanpa perlu menjadi nasabah, asal memiliki nomor *handphone* dan alamat email untuk registrasinya, serta bisa dijadikan alat pembayaran di ekosistem QRIS yang telah dimiliki Bank BPD Bali, sehingga tidak perlu lagi membawa uang *cash*, karena kedepan cukup dengan *top up* uang elektronik Balipay Bank BPD Bali segala bentuk pembayaran akan lebih mudah dilakukan. ■



BANK BPD BALI

BANK BPD BALI

Balipay
Bank BPD Bali
Forward with flexibility

Ayo Segera Download
Balipay Bank BPD Bali di

Download on the
App Store

Available on the
Google Play

Bank BPD Bali Berizin dan Diawasi Oleh
Otoritas Jasa Keuangan

LEMBAGA KEUANGAN TERPADU

1500-844
www.bpd Bali.co.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
@bankbpd Bali

Tali Kasih Perbanas di Blitar dan Trenggalek

Tak sekadar berbagi bahan makanan, minuman, dan pakaian, Perbanas juga merasa perlu mendatangi langsung korban banjir di Blitar dan Trenggalek. Agar mereka tak merasa sendiri.

Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Blitar dan Trenggalek menggerakkan hati bankir-bankir di Kediri yang tergabung dalam Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Daerah Kediri. Bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kediri dan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Daerah (FKLJKD) Kediri, mereka memberikan bantuan berupa bahan makanan, minuman, dan pakaian.

"Kami membawa beberapa bahan makanan, minuman, sarung, selimut, jas hujan, Pampers (popok bayi), susu bayi, pakaian dalam, makanan bayi, kompor, tabung gas *LPG*, dan lain-lain. Semoga bisa membantu meringankan beban para korban," ujar pengurus Perbanas Kediri saat memberikan bantuan di Posko Siaga Bencana Kecamatan Panggungrejo, Blitar, pada 21 Oktober 2022, dan di Pendapa Kabupaten Trenggalek, pada 25 Oktober 2022.

Peristiwa banjir dan tanah longsor terjadi di Kabupaten Trenggalek pada Selasa, 18 Oktober 2022. Kejadian berawal dari meluapnya Sungai Tawing setelah diguyur hujan deras beberapa jam. Terdapat 11 kecamatan yang terdampak banjir dan tanah longsor, antara lain Kampak, Dongko, Gandusari, Tugu, Pule, Trenggalek, Pogalan, Karang, dan Durenan.

Sehari sebelumnya, pada Senin, 17 Oktober 2022, juga terjadi banjir bandang di Kabupaten Blitar. Peristiwa tersebut menyebabkan rumah warga terendam banjir. Sejumlah warga pun mengungsi ke posko-posko yang disediakan. Ada lima kecamatan yang terdampak, yaitu Binangun, Panggungrejo, Sutojayan, Wonotirto, dan Wates. ■





PERBANAS
INSTITUTE

***Envision Your
Future, Today!***

#FintechCollege

**Beasiswa
Hingga
25%***

Bagi Alumni Perbanas Institute yang melanjutkan ke Prodi Magister Manajemen dan Magister Akuntansi.

**Daftar
Sekarang!**

FAKULTAS

EKONOMI & BISNIS

- S-1 Akuntansi
- S-1 Manajemen
- S-1 Ekonomi Syariah
- D-3 Akuntansi Perpajakan
- D-3 Keuangan Perbankan

FAKULTAS

TEKNOLOGI INFORMASI

- S-1 Teknik Informatika
- S-1 Sistem Informasi
- S-1 Analitika Data Bisnis*

PROGRAM

EKSTENSI

- S-1 Akuntansi
- S-1 Manajemen
- S-1 Ekonomi Syariah
- S-1 Sistem Informasi

SEKOLAH

PASCASARJANA

- Magister Akuntansi
- Magister Manajemen
- Pendidikan Profesi Akuntan (PPAk)

Informasi:

Tlp : (021) 5252-533
WA : +62 811-9990-997
www.perbanas.id

Daftar online di:

admisi.perbanas.id

